

## **MENDORONG SEMANGAT INKLUSI MENUJU KEHIDUPAN BERSAMA COVID-19**

**SERI POLICY BRIEF POPULI CENTER, NO.5. 02 SEPTEMBER 2021**

Darin Atiandina

*Peneliti, Populi Center*

Darinatiandina@populicenter.org

### **Pengantar**

COVID-19 memberikan dampak yang berbeda-beda kepada setiap orang. Kelompok rentan atau mereka yang memiliki risiko lebih besar terhadap kondisi kesehatan dan sosial yang buruk, berpotensi merasakan dampak yang lebih berat (Rukmana, 2014). Sehingga, kelompok ini perlu mendapat perhatian bersama dalam beradaptasi memasuki kehidupan bersama COVID-19. Berdasarkan data dari Bappenas, kelompok rentan terdiri dari masyarakat lanjut usia (lansia) yang hidup sendiri dan tidak memiliki sumber pendapatan, rumah tangga dengan anggota keluarga lansia, penyandang disabilitas, perempuan miskin dan ibu hamil, pekerja informal, termasuk kelompok adat terpencil, hingga kelompok yang rentan secara sosial (Diskusi Forum Populi, 19/08/21). Perkerjaan rumah ini bukan hanya menjadi pekerjaan bagi pemerintah saja, melainkan tugas kita semua untuk memastikan mereka yang masuk ke dalam kategori kelompok rentan ini menjadi tidak semakin terpinggirkan. Mereka harus mendapatkan akses yang sama di fase hidup bersama COVID-19.

### **Masalah**

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk memperhatikan mereka yang termasuk ke dalam kelompok rentan di masa pandemi COVID-19. Pertama, tersedianya protokol bagi penyandang disabilitas, misalnya, ada tiga kementerian yang setidaknya mengeluarkan pedoman khusus penyandang disabilitas. Kementerian Sosial (Kemensos) mengeluarkan pedoman berkaitan dengan perlindungan kesehatan dan dukungan psikososial terhadap penyandang disabilitas di tengah wabah COVID-19. Kemudian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan pedoman tentang layanan kelas daring untuk pengajaran mahasiswa

tuli di perguruan tinggi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) juga mengeluarkan pedoman berkaitan dengan perlindungan khusus bagi perempuan penyandang disabilitas dan perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas dalam situasi Pandemi COVID-19.

Kedua, pemerintah secara umum telah memberikan jaring pengaman berupa bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat rentan. Berdasarkan keterangan dari Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (PKPM) Bappenas, Maliki, Bantuan tersebut disampaikan lewat beberapa program, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kartu Sembako Bantuan Sosial Tunai (BST), diskon listrik, BLT Dana Desa, Bantuan Beras Bulog, Kartu Sembako PPKM, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN), Subsidi Kuota Internet, Bantuan Subsidi Upah untuk pekerja sektor formal, Kartu Pra Kerja, dan lain-lain (Diskusi Forum Populi, 19/08/21).

Ketiga, selain bansos, pemerintah juga melakukan perbaikan data terhadap masyarakat rentan. Kemensos pada Juni 2020 lalu, melakukan upaya sinkronisasi pendataan nasional masyarakat disabilitas lintas kementerian dengan melibatkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, dan Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Bappenas (Fenisianti, et al, 2020). Walaupun sinkronisasi ini tidak secara khusus ditujukan untuk penanganan COVID-19, tetapi upaya ini dapat meningkatkan efektivitas dan jangkauan bantuan COVID-19 untuk penyandang disabilitas.

Terlepas dari sejumlah kebijakan yang ada, sayangnya penanganan COVID-19 yang ramah terhadap masyarakat rentan masih belum cukup teraplikasikan di lapangan. Pendataan menjadi salah satu masalah yang dihadapi pemerintah, mulai dari jumlah hingga kebutuhan dari masyarakat rentan. Pemerintah kesulitan untuk mendata khususnya pada sektor atau kelompok pekerja informal dan penyandang disabilitas (Keterangan Dir. PKPM Bappenas, Maliki, dalam Diskusi Forum Populi, 19/08/21). Pada kasus penyandang disabilitas, masih ada banyak keluarga yang enggan mendata anggota keluarganya yang memiliki keterbatasan secara mental atau fisik. Alasannya adalah malu pada lingkungan sekitar. Akibatnya, anggota keluarga dengan status penyandang disabilitas tersebut tidak memiliki e-KTP, padahal e-KTP menjadi penentu bagi akses mereka terhadap program serta strategi inklusif pemerintah.

Belum adanya pendataan terperinci terkait kebutuhan dari masing-masing kategori kelompok rentan menjadi masalah berikutnya. Lansia, penyandang disabilitas, rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan, anak-anak, hingga masyarakat adat memerlukan *'treatment'* yang berbeda-beda dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sehingga, bantuan yang diberikan oleh pemerintah pun seharusnya menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok. Hingga saat ini, bantuan sosial pemerintah terkesan *'dipukul rata'* untuk masyarakat rentan, tanpa mempertimbangkan kebutuhan terperinci dari masing-masing kategori masyarakat rentan.

## Analisa

Di antara berbagai faktor yang dapat menyebabkan permasalahan-permasalahan di atas, satu yang dominan terjadi di Indonesia adalah minimnya penerapan prinsip inklusivitas dalam pengambilan kebijakan penanganan COVID-19. Hal ini terlihat dari ketiadaan representasi masyarakat rentan sebagai pemangku kepentingan strategis. Hingga saat ini, kita sulit untuk menemukan komunitas masyarakat rentan, misalnya komunitas penyandang disabilitas atau komunitas masyarakat adat, yang ikut terlibat dalam proses penyusunan kebijakan penanganan COVID-19, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam situasi krisis, segala bentuk kebijakan untuk kelompok masyarakat rentan cenderung menempatkan mereka sebagai objek dan bukan subjek (Masudi & Winanti, 2020). Penempatan ini terkesan wajar dan masuk akal karena pada situasi krisis, masyarakat rentan berada dalam posisi yang sangat lemah. Namun, agar penanganan terhadap masyarakat rentan tetap terarah dan tepat sasaran, pelibatan mereka dalam aspek penanganan krisis sangat diperlukan. Kelompok masyarakat rentan memiliki mekanisme kolektif untuk mendefinisikan kebutuhan juga kepentingan mereka dalam situasi krisis (Masudi & Winanti, 2020).

Pada kelompok masyarakat adat terpencil, misalnya, yang mereka butuhkan bukan lagi menyoal bantuan bahan pokok makanan atau kuota internet. Masyarakat adat memiliki pola tersendiri untuk mewujudkan kedaulatan pangan, yang bahkan jumlah produksi makanan mencapai surplus hingga dapat digunakan untuk membantu warga di sekitarnya (Keterangan Sekjen I AMAN, Eustobio Rero Renggi, dalam Diskusi Forum Populi, 19/08/21). Salah satu tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat dan perlu mendapat bantuan dari pemerintah adalah akses terhadap vaksinasi (Mongabay.co.id, 1/8/21). Laporan wabah COVID-19 semakin banyak ditemukan keberadaannya di lingkungan masyarakat adat. Namun demikian, vaksinasi untuk masyarakat adat masih sangat terbatas. Masyarakat adat masih kesulitan mendapatkan vaksinasi COVID-19 karena banyak yang tidak memiliki KTP sebagai syarat vaksinasi. Selain itu, sosialisasi soal vaksinasi pada masyarakat adat juga masih minim, sehingga mereka tidak mendapatkan informasi secara utuh. Alhasil, informasi yang banyak mereka terima justru soal bahaya vaksin yang antara lain dapat menyebabkan orang meninggal dunia.

Contoh lain pada kelompok anak-anak penyandang disabilitas, yang tentunya membutuhkan bantuan yang berbeda dengan anak-anak atau kelompok rentan pada umumnya. Sebanyak 278 siswa disabilitas di Sekolah Luar Biasa (SLB) Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, mengalami hambatan belajar jarak jauh selama masa pandemi COVID-19 (mediaindonesia.com, 24/3/2021). Siswa di SLB Kabupaten Temanggung terdiri dari disabilitas netra, tuna rungu wicara, dan disabilitas intelektual. Kondisi keterbatasan pada setiap anak disabilitas membuat mereka tidak bisa disamakan dengan anak-anak normal yang ada di sekolah reguler. Pada anak normal memang metode belajar daring dengan berbagai aplikasi bisa diterapkan. Tapi hal ini tidak mudah dilakukan pada penyandang disabilitas.

Minimnya keterlibatan masyarakat rentan menjadikan kebijakan penanganan krisis yang ada saat ini bersifat *state centric* dan birokratis (Masudi & Winanti, 2020). Negara

sepenuhnya menjadi aktor yang memegang kendali atas kebijakan penanganan COVID-19. Pada akhirnya, pola demikian berdampak pada pendefinisian kebutuhan masyarakat rentan cenderung mengacu pada ukuran-ukuran yang ditetapkan secara birokratis. Seringkali ukuran tersebut tidak mencerminkan kondisi nyata situasi dinamis saat krisis. Dua kasus di yang dialami oleh masyarakat adat dan anak-anak disabilitas adalah contoh sederhananya. Oleh karenanya, keterlibatan komunitas masyarakat rentan sangat penting untuk menghadirkan informasi paling akurat dari kondisi kelompok-kelompok rentan.

Pemerintah perlu mengkaji kembali strategi yang lebih tepat. Salah satunya melalui penerapan inovasi inklusif sebagai landasan membuat kebijakan merespons tantangan aktual di masyarakat. Langkah afirmatif yang bisa dilakukan, antara lain mulai dari melibatkan lebih banyak pimpinan yang memiliki visi pengarusutamaan gender, inklusivitas, atau perwakilan komunitas masyarakat rentan dalam pengambilan keputusan penanganan COVID-19. Dibutuhkan kepemimpinan dan komitmen politik solid untuk mengarusutamakan representasi komunitas masyarakat rentan dalam kebijakan COVID-19.

## **Rekomendasi**

1. Mendata jumlah dan kebutuhan terperinci dari tiap kelompok masyarakat rentan di masa pandemi COVID-19. Agar program-program jaring pengaman sosial dapat tepat sasaran, tentunya dibutuhkan basis data yang akurat dan terpercaya.
2. Proses pendataan dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mengintegrasikan secara cepat data-data yang sudah tersedia.
3. Data yang sudah terintegrasi, dapat terus diperbarui dengan menyesuaikan dinamika yang ada di lapangan dengan melibatkan peran komunitas masyarakat. Dengan data yang akurat, kebijakan terhadap kelompok rentan akan lebih responsif dan tepat sasaran.
4. Membuat kebijakan jangka pendek, jangka menengah, serta jangka panjang. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada saat tanggap darurat hanya menysasar pada kebutuhan jangka pendek untuk menyelamatkan kehidupan masyarakat rentan. Perlu dirumuskan kebijakan jangka menengah dan panjang yang menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat rentan bersama COVID-19.
5. Melibatkan berbagai komunitas masyarakat rentan (AMAN, dan lain-lain) dalam perumusan kebijakan. Agar kebijakan penanganan krisis mendapatkan respon dan dukungan dari masyarakat, nilai kemanusiaan dan aspek inklusi harus dikedepankan.
6. Mendukung semangat kolaborasi para relawan penggerak penanggulangan COVID-19 dan NGOs di level masyarakat berbagai level, terutama di pedesaan sehingga sinergi dengan kebijakan pemerintah.
7. Melakukan evaluasi bulanan terkait efektivitas penanganan COVID-19 bagi komunitas masyarakat rentan.

8. Meningkatkan perluasan kajian terkait efektivitas kebijakan penanganan COVID-19 bagi komunitas masyarakat rentan, termasuk memperluas sumber rujukan penanganan berasal dari komunikasi dengan negara anggota ASEAN lainnya demi persiapan memasuki hidup berdampingan dengan COVID-19.

## Referensi

- Fenisianti, Christella., Dzakwan, Muhammad Habib Abiyan. 28 Juli 2020. *Menciptakan Inklusivitas dalam Kehidupan Normal Baru Pasca COVID-19: Seri Masyarakat Tuli*. CSIS Commentaries DMRU-0890ID.
- Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, 7 Mei 2020. *Panduan Perlindungan Khusus dan Lebih Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas dalam Situasi Pandemi COVID-19*. <https://covid19.go.id/p/protokol/panduan-perlindungan-khusus-dan-lebih-bagi-perempuan-penyandang-disabilitas-dalam-situasi-pandemic-covid-19>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 19 Mei 2020, Panduan Layanan Kelas Daring (Online) untuk pengajaran Mahasiswa Tuli/HOH/Disabilitas Rungu di Perguruan Tinggi. <https://dikti.kemdikbud.go.id/pengumuman/panduan-layanan-kelas-daring-online-untuk-pengajaran-dan-mahasiswa-tuli-hoh-disabilitas-rungu-di-perguruan-tinggi/>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2 Juni 2020, Protokol Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas dalam Pandemi COVID-19 Resmi Diluncurkan. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2711/protokol-perlindungan-terhadap-anak-penyandang-disabilitas-dalam-pandemi-covid-19-resmi-diluncurkan>
- Kementerian Sosial. 27 Maret 2020. Pedoman Cegah COVID-19. [kemosos.go.id/pedoman-cegah-covid-19-untuk-disabilitas](https://kemosos.go.id/pedoman-cegah-covid-19-untuk-disabilitas)
- Mas'udi, Wawan., Winanti., Poppy. 14 April 2020. Menyelamatkan Kelompok Rentan: Kebijakan Inklusif Penanganan Dampak COVID-19. FISIPOL UGM.
- Mediaindonesia.com, 24 Maret 2021. Anak-Anak Disabilitas Kesulitan Belajar Daring. <https://mediaindonesia.com/nusantara/392828/anak-anak-disabilitas-kesulitan-belajar-daring>
- Merdeka.com, 20 Mei 2020. Kemendikbud Catat 646.200 Sekolah Tutup Akibat Virus Corona. <https://www.merdeka.com/uang/kemendikbud-catat-646200-sekolah-tutup-akibat-virus-corona.html>
- Mongabay.co.id, 1 Agustus 2021. Menyoal COVID-19 dan Akses Vaksin bagi Masyarakat Adat. <https://www.mongabay.co.id/2021/08/01/menyoal-covid-19-dan-akses-vaksin-bagi-masyarakat-adat/>
- Populi Center. Diskusi Forum Populi “Menuju Tanggap COVID-19 yang Inklusif”, 19 Agustus 2021. [https://www.youtube.com/watch?v=caUrK1fq\\_kA&t=6672s](https://www.youtube.com/watch?v=caUrK1fq_kA&t=6672s)
- Rukmana, Deden. 2014. Vulnerable Populations. In: Michalos A.C. (eds) Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research. Springer, Dordrecht.
- unicef.org, 4 Desember 2020. Menuju Dunia Pasca COVID-19 yang Berkelanjutan serta inklusif dan Ramah Bagi Penyandang Disabilitas. <https://www.unicef.org/indonesia/id/stories/menuju-dunia-pasca-covid-19-yang-berkelanjutan-serta-inklusif-dan-ramah-bagi-penyandang>